BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi dan Tata Buku

Di indonesia istilah akuntansi relatif belum lama dikenal, bila dibandingkan dengan istilah tata buku. Sampai dengan akhir tahun limapuluhan, masyarakat hanya mengenal istilah tata buku yang merupakan warisan dari Belanda. Istilah akuntansi baru dikenal pada awal tahun enampuluhan, yaitu ketika akuntansi yang berasal dari Amerika Serikat mulai masuk ke indonesia sejak itu orang menganggap bahwa akuntansi adalah sistem pembukuan yang berasal dari Amerika Serikat dan Tata Buku adalah sistem pembukuan model Belanda. Pengertian semacam itu tidak benar. Tata Buku yang telah dikenal sejak jaman Belanda tidak lain adalah bagian dari sistem akuntansi Belanda. Tata Buku sebenarnya merupakan sebagian dari proses akuntasi, khususnya yang berkaitan dengan proses pencatatan. Tata Buku adalah elemen prosedural dari akuntansi, seperti halnya aritmatika adalah elemen prosedural dari matematika.[1]

Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen sangat menonjol khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan.[2] Akuntansi sering disebut sebagai "Bahasa Bisnis", atau mungkin akan lebih tepat jika disebut " Bahasa Pengambilan Keputusan". Semakin kita kuasai bahasa ini,

---

[1] . AL. Haryono Jusup , Universitas Gajah Mada. "Dasar-dasar Akuntansi " edisi empat tentang akuntansi dan lingkungannya halaman 5 Bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

[2] . AL. Haryono Jusup, Universitas Gajah Mada. "Dasar-dasar Akuntansi" edisi empat tentang akuntansi dan lingkungannya halaman 3 Bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

akan semakin baik pula kita menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupan ini .[1]

Untuk lebih jelasnya definisi dari akuntansi itu sendiri adalah sebagai berikut :

Definisi dari sudut pemakai :

Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan infomasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi .[2]

Definisi dari sudut proses kegiatan :

Akuntansi adalah merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.[3]

Drs. Mardiasmo MBA., Akuntan. Dosen Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta berpendapat bahwa :

akuntansi adalah merupakan seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi dengan cara-cara tertentu yang sistematis, serta penafsiran terhadap hasilnya. [4]

Bahkan ada suatu pendapat yang mendefinisikan tentang akuntansi sebagai berikut :

---

[1]. AL. Haryono Jusup, Universitas Gajah Mada," Dasar-dasar akuntansi" edisi 4 tentang akuntansi dan lingkungannya halaman 4 bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

[2]. AL. Haryono Jusup, Universitas Gajah Mada,"Dasar-dasar Akuntansi" edisi 4 tentang akuntansi dan lingkungannya halaman 4 bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

[3] .AL. Haryono Jusup, Universitas Gajah Mada,"Dasar-dasar akuntansi" edisi 4 tentang akuntansi dan lingkungannya halaman 5 bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

[4] .Drs Mardiasmo MBA Akuntan. Dosen Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta dalam bukunya "Akuntasi Keuangan Dasar I" edisi ke dua. BPFE Yogyakarta halaman 1.

Akuntansi adalah merupakan pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi bisnis serta penginterpretasian informasi yang telah disusun. [5]

Jadi dapat dikatakan bahwa akuntansi itu berbeda dengan tata buku yang hanya mencakup tugas pencatatan transaksi keuangan, atau dengan kata lain akuntansi lebih luas dari tata buku.

2.2 Pembukuan

2.2.1 Pengertian

Peranan pembukuan di dalam suatu perusahaan sangatlah penting dan juga menunjang maju mundurnya perusahaan itu sendiri.

Selain itu juga pembukuan merupakan suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan pemerintah, sistem pembukuan yang baik dan benar akan sangat membantu bagi kelancaran kegiatan kerja dan prosedur yang telah ditetapkan seperti halnya di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Sebagaimana yang diuraikan oleh Soemarso S.R. dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Suatu Pengantar" mengungkapkan bahwa :

Pembukuan pemerintahan (Governmental Book-keeping) adalah bidang pembukuan yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam badan-badan pemerintah dengan cara tertentu. [6]

---

[5] .DR. Basu Swastha DH.,SE.,MBA. dan Ibnu Sukotjo W. SE. "Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern) edisi ke tiga halaman 314.

[6] . Soemarso S.R. dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Suatu Pengantar" terbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1986 halaman 24.

Pembukuan pemerintahan (Governmental Book-keeping) mengkhususkan pada pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah, juga menyediakan laporan pembukuan yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan (Business aspek) organisasi keuangan negara atau daerah dan membantu untuk mengadakan kontrol atas pengeluaran dan pendapatan melalui anggaran negara atau daerah tersebut agar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

> *"The book-keeping system is an organization of forms, records, and reports, closely coordinated to facilitate business management through determining certain basic and requred information ".*

Pengertian ini diungkapkan oleh John. J.W. Neuner, Ph.D.,C.P.A. dan Ulrich J. Neuner,M.A. Dalam bukunya berjudul "Accounting System" .[7]

Pembukuan merupakan media informasi, juga acapkali pembukuan disebut sebagai bahasa dunia usaha atau bisniss (Business Language) bahkan Hongren dan Charles T. dalam bukunya "Introduction to Financial Accounting" lebih senang menyebut sebagai bahasa keputusan keuangan (language of financial decision) .

Dan pengertian pembukuan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

> *Pembukuan keuangan daerah adalah merupakan suatu tatanan yang terdiri dari perangkat pengelola seperti prosedur pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian informasi keuangan daerah dengan alat bantu teknologi informasi yang*

---

[7] . Jhon J.W.Neuner ,Ph.D .,C.P.A dan Ulrich J.Neuner ,M.A." Accounting System" tahun 1972 halaman 3.

saling bekerja sama dalam rangka mendukung proses pengelolaan keuangan daerah. [8]

2.2.2 Tujuan

Tujuan pembukuan adalah mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan dan menginterprestasikan data ekonomi untuk digunakan oleh banyak kelompok di dalam sistem ekonomi dan sosial kita. Dalam pengertian ini, pembukuan sering kali disebut "bahasa bisnis". Bahasa ini dapat dianggap sebagai suatu sistem informasi yang memberikan informasi penting tentang suatu kesatuan kegiatan keuangan kepada berbagai individu atau kelompok untuk digunakan dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang terinformasi.

Soemarso S.R. dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Suatu Pengantar" berpendapat bahwa :

Tujuan utama pembukuan adalah menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (ekonomic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan.[9]

Lain halnya seperti yang diungkapkan oleh Evanson dan Illinors dalam bukunya "American Accounting Assosiation". menyebutkan bahwa :

Pengertian pembukuan berdasarkan tujuan dan ruang lingkup pembukuan adalah *"... proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya*

---

[8]. Usadi Sistemindo Intermatika. "Pedoman Pengoperasian P3KD (Piranti Pendukung Pembukuan Keuangan Daerah) versi 3.0 halaman 3.

[9]. Soemarso S.R. "Akuntansi Suatu Pengantar" Lembaga fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1986 halaman 5.

penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut".[10]

Dilihat dari definisi di atas mengandung beberapa pengertian yaitu:

- Pembukuan merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi (bagian ini menjelaskan tentang kegiatan pembukuan).
- Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh pembukuan diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan (segi kegunaan dari pembukuan).

Untuk menghasilkan informasi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisa dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan kemudian melaporkan hasilnya.

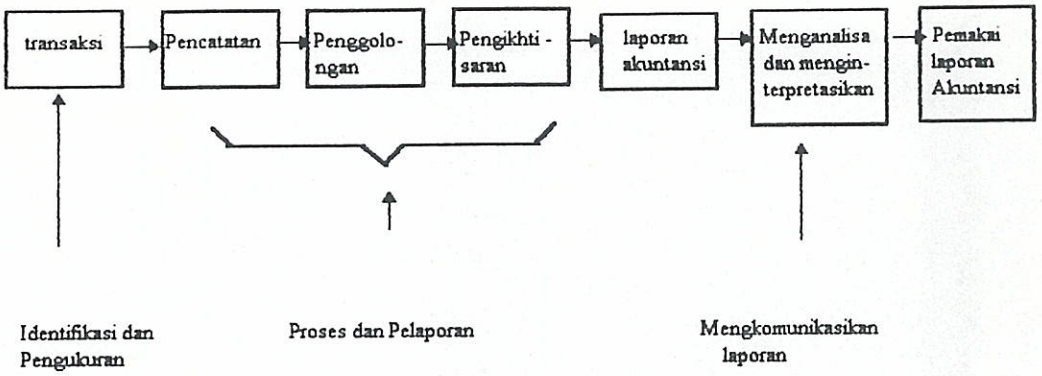
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembukuan seperti yang diuraikan oleh Soemarso S.R. dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Suatu Pengantar" antara lain :

1. Identifikasi dan mengukur data yang relevan untuk suatu keputusan yang dibuat.
2. Memproses data yang bersangkutan kemudian menyusun laporan.
3. Menkomunikasikan laporan kepada pemakai.

Kegiatan-kegiatan di atas tersebut perlu dirangkaikan dalam suatu sistem yang disebut sistem pembukuan sebagai bagian dari sistem akuntansi. Apabila dirangkaikan secara ringkas proses pembukuan tersebut nampak sebagai berikut :

---

[10]. Evanson dan Ellinors "American Accounting Association". A Statement of Basic Accounting Theory. tahun 1966 halaman 1.



Tujuan diterapkannya Pembukuan Keuangan Daerah di lingkungan pemerintah daerah khususnya Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- Menyajikan informasi realisasi APBD bulanan, triwulan, tahunan, dengan cepat dan akurat.
- Memberikan kemudahan dalam perhitungan anggaran.
- Memberikan kemudahan dalam pencarian data tahun-tahun yang lalu.

2.3 Anggaran

Di dalam perusahaan anggaran ini diarahkan untuk menetapkan sasaran penjualan dan laba, serta perencanaan yang terinci untuk mencapai sasaran tersebut. Penyusunan anggaran selalu memperhatikan data masa lalu yang dilaporkan dalam laporan akuntansi. Anggaran juga digunakan untuk mengawasi jalannya operasi perusahaan melalui perbandingan antara data yang sesungguhnya dengan anggaran. Oleh karena itu perusahaan biasanya memandang kegiatan peranggaran sebagai aspek yang penting dari sistem akuntansinya.[11]

---

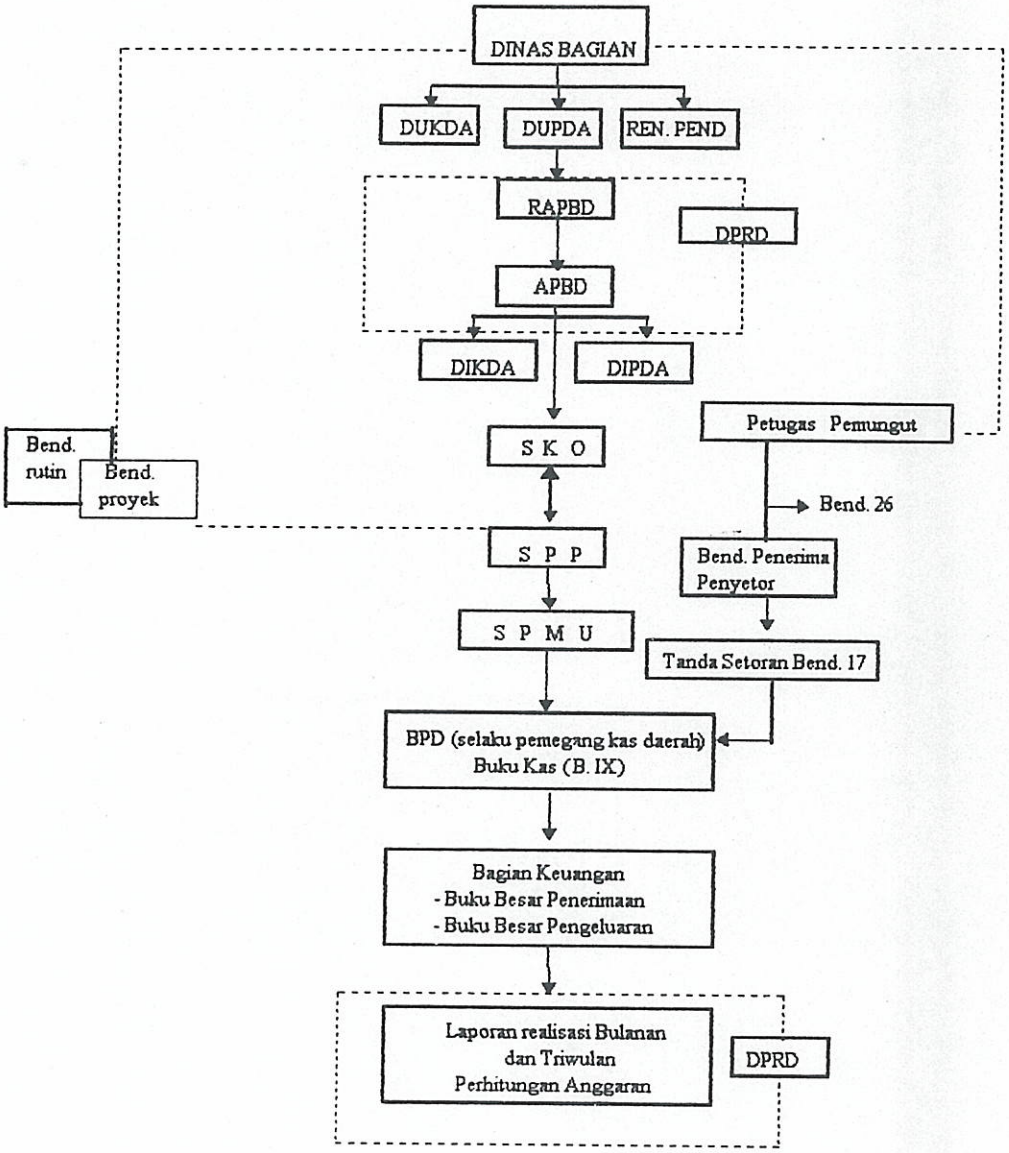
[11] . AL. Haryono Jusup, universitas Gajah Mada, "Dasar-dasar Akuntansi "edisi empat tentang akuntansi dan lingkungannya halaman 9 , bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sebagaimana diuraikan pada Bab I, maka proses penyelenggaraan keuangan daerah merupakan tahapan atau urutan kerja yang harus dilakukan secara sistematis dari sebuah periode anggaran keuangan yang dimulai dari tanggal 1 April sampai 31 Maret pada tahun berikutnya.

Sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang cara penyusunan APBD serta pelaksanaan tata usaha, maka penyelenggaraan keuangan dalam satu periode diawali dengan penyusunan suatu anggaran yang terdiri dari rencana-rencana Pendapatan dan Belanja yang dikenal dengan APBD.

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut anggaran tersebut secara umum tahapannya dilakukan seperti yang tertera dalam gambar 01 berikut ini :

GAMBAR 01
BAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DI PEMDA KOTAMADYA DT II BANDUNG



Sumber :
Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975
Tentang cara penyusunan APBD serta pelaksanaan tata usaha.

Secara singkat keterangan dari gambar 01 diatas adalah sebagai berikut :

I. Tahap perencanaan dan penyusunan anggaran :

a. Tiap bagian mengajukan Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA), Daftar Usulan Pembangunan Daerah (DUPDA) dan rencana pendapatan daerah.

b. RAPBD dibahas bersama DPRD untuk dijadikan pengelolaan keuangan dalam sebuah anggaran .

II. Tahap penetapan dan pengesahan :

a. Penetapan Peraturan Daerah.

b. Penetapan DUKDA menjadi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan penetapan DUPDA menjadi Daftar Isian Pembangunan Daerah (DIPDA).

c. Pembuatan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

III. Tahap Pelaksanaan APBD

a. Pendapatan

1. Tiap-tiap bagian menyetorkan hasil pendapatannya itu kepada pemegang kas daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, melalui bendaharawan penerima dan penyetor dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) atau bend .17.
2. Kemudian Bank Jabar mencatat tanda setoran tersebut kedalam Buku Kas (B.IX) sebagai penerimaan.

b. Belanja

1. Tiap dinas yang memerlukan pengeluaran berdasarkan SKO atau DIPDA, DIKDA melalui bendaharawan rutin / bendaharawan proyek ke Bagian Keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
2. Setelah SPMU dibuat sesuai dengan siapa yang berhak menerimanya kemudian diuangkan di BPD selaku pemegang Kas Daerah.

3. BPD membayar SPMU tersebut dan mencatatnya kedalam Buku Kas umum sebagai pengeluaran.
4. Buku Kas Umum tersebut dibuat dan dicatat serta ditetapkan setiap hari, dan hasilnya dikirimkan ke Bagian Keuangan khususnya Sub Bagian Pembukuan esok harinya.
5. Sub Bagian Pembukuan meneliti dan mencocokan bukti-bukti dalam Buku Kas Umum tersebut kemudian mencatat kembali dengan tahap-tahap sebagai berikut :
   a. Pendapatan dicatat dalam Buku Besar Penerimaan (B.IV) dengan ayatnya.
   b. Pengeluaran atau belanja dicatat didalam Buku Besar Pengeluaran dan dibuat laporan bulanan, triwulan,dan tahunan.
   c. Laporan bulanan dikirim kepada pimpinan daerah.
   d. Laporan triwulan disampaikan ke propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
   e. Laporan tahunan yang disebut juga Perhitungan Anggaran daerah Tingkat II Bandung ditetapkan oleh DPRD Kotamadya DT II Bandung dan disyahkan oleh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2.4 Pendapatan

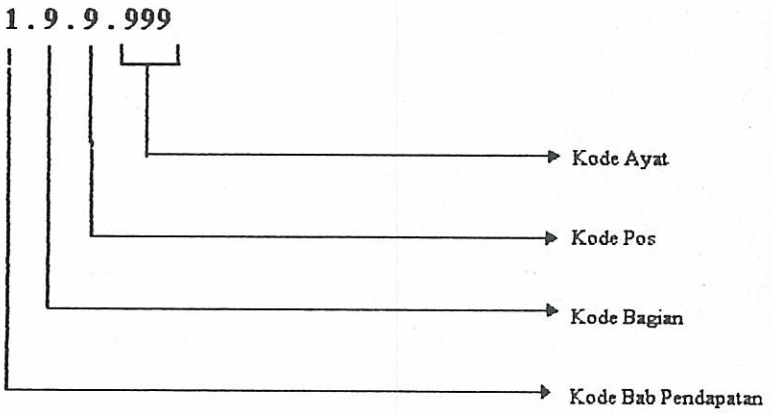
Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada bab terdahulu yaitu tentang daerah otonom yang diberi wewenang untuk melaksanakan / memungut sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah itu terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba dari Perusahaan daerah, Penerimaan dari Dinas-Dinas dan Penerimaan Lain-lain.

Sedangkan definisi dari pendapatan itu sendiri adalah sebagai berikut :

Pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan atau pemberian jasa.[12]

Adapun menurut sifat pendapatan dan jenis pendapatan untuk masing-masing kelompok, maka struktur pendapatan secara umum adalah seperti gambar 02 dibawah ini :

GAMBAR 02
STRUKTUR PENDAPATAN
UMUM



Sumber :
REDECON (Resource Development Consultan) "Pengenalan Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1993/1994 modul Struktur Anggaran hal. II-1.

Sesuai dengan kode Bab dan Kode Bagian di atas maka Pendapatan pun dapat dikelompokan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

---

12 . AL.Haryono Jusup, Universitas Gajah Mada. "Dasar-dasar Akuntansi " edisi 4 tentang akuntansi dan lingkunganya halaman 24 bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Tabel 2.1
Pengelompokan Bagian Pendapatan

KODE	URAIAN
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
1.2	Pendapatan Asli Daerah.
1.3	Bagi hasil pajak dan bukan pajak.
1.4	Sumbangan dan Bantuan
1.5	Bagian penerimaan pembangunan
1.6	Urusan Kas dan Perhitungan

Sumber :
REDECON April 1993 "Struktur Anggaran yang berlaku" hal. II-1.

Tabel 2.1 menyajikan pengelompokan pendapatan. Secara umum Anggaran Pendapatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu :

(1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu yang merupakan surplus anggaran kumulatif pada tahun-tahun sebelumnya.

(2) Pada tahun berjalan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasi Pajak dan bukan pajak serta Sumbangan dan Bantuan.

(3) Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan daerah, yaitu penerimaan pembangunan (penerimaan pinjaman) dan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP).

Dipandang dari sudut penggunaan dana, Anggaran Pendapatan dapat dibagi dua menjadi :

a. Anggaran pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti sisa lebih perhitungan, sebagian PAD dan sumbangan.

b. Anggaran pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran pembangunan seperti sisa lebih perhitungan, bantuan dan pinjaman.

Selain pengelompokan dengan kode bab dan kode bagian, pendapatan dapat pula dikelompokan menurut bagian dan pos. Pengelompokkan tersebut adalah seperti tertera dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pengelompokan Pendapatan
menurut Bagian dan Pos

BAGIAN	POS	URAIAN
1.1		Sisa perhitungan anggaran tahun lalu
1.2		Pendapatan Asli Daerah
	1.2.1	Pajak Daerah
	1.2.2	Retribusi Daerah
	1.2.3	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
	1.2.4	Penerimaan dari dinas-dinas
	1.2.5	Penerimaan lain-lain
1.3		Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
	1.3.1	Bagi Hasil Pajak
	1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
1.4		Sumbangan dan Bantuan
	1.4.1	Sumbangan
	1.4.2	Bantuan
1.5		Penerimaan (Pinjaman) Pembangunan
1.6		Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)

Sumber :
REDECON halaman II-2

Sebagaimana yang tercantum dalam tabel 2.2 di atas, yang memiliki pos terbanyak adalah Bagian Pendapatan Asli Daerah. Dimana yang termasuk Pendapatan Asli Daerah sendiri (PADS) ialah :

1. Pajak Daerah ; yang mencakup penerimaan dari berbagai jenis pajak yang dikenakan dan diadministrasikan oleh pemerintah daerah.

2. Retribusi Daerah; penerimaan dari retribusi daerah, tidak termasuk retribusi yang dipungut oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Pembagian laba (Dividen) dari BUMD seperti PDAM, BPD, Bank Pasar dan perusahaan daerah lainnya.
4. Penerimaan dari dinas-dinas yang memberikan jasa pelayanan seperti DPU, Dinas Kesehatan Umum, Dinas Pertanian dan dinas-dinas lainnya.
5. Penerimaan lain-lain ; yang mencakup penerimaan dari sewa bangunan dan peralatan milik pemerintah daerah, penerimaan dari penjualan kekayaan pemerintah daerah, penerimaan bunga, konpensasi atas penggunaan tanah pemerintah daerah dan lain-lain.[13]

Setiap pos pendapatan kemudian dirinci lebih lanjut menurut jenis pendapatan. Misalnya pajak daerah dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

1.2.1.001 Pajak Kendaraan Bermotor

1.2.1.002 Pajak BBN Kendaraan Bermotor

Berbeda dengan sistem pengkodean Bagian dan Pos, sistem pengkodean ayat pendapatan disusun dengan sistem blok sebagai berikut :

---

[13] . Pengenalan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , modul pelatihan V , "Analisis Kapasitas Meminjam Pemerintah Daerah" halaman 3.

TABEL 2.3
SISTEM PENGKODEAN
AYAT PENDAPATAN

AYAT	URAIAN
000	Sisa perhitungan anggaran tahun lalu.
001 - 070	Pajak Daerah.
071 - 120	Retribusi Daerah.
121 - 140	Laba Badan Usaha Milik Daerah.
141 - 180	Pendapatan dari dinas-dinas.
181 - 190	Penerimaan lain-lain.
191 - 200	Bagi hasil pajak.
201 - 210	Bagi hasil bukan pajak.
211 - 220	Sumbangan.
221 - 230	Bantuan.
231 - 250	Pinjaman pemerintah daerah.
251 - 270	UKP penerimaan .

Sumber :

REDECON, II -3.